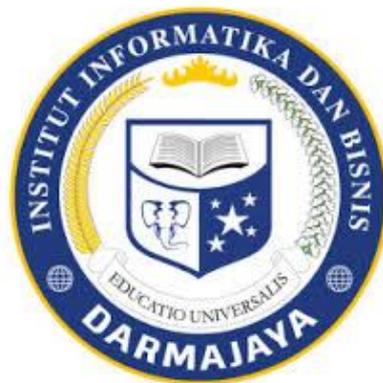


**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE
(Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola
Keuangan Bidang Aset)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Della Gustulangi

1512120168

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2021**



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi atau karya yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali secara terulis dibaca dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggung jawaban sepenuhnya berada di pundak saya.

Bandar Lampung, 09 September 2021

Della Gustulangi
1512120168

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset)**

Nama Mahasiswa : **Della Gustulangi**

NPM : **1512120168**

Program Studi : **S1-Akuntansi**

Disetujui oleh :

Pembimbing

Nolita Yeni Siregar., S.E., Ak., M.S.Ak., CA

NIK. 00420702

Ketua Jurusan Akuntansi

Toni Nurhadianto., S.E., M.Sc

NIK. 14900319

HALAMAN PENGESAHAN

Pada tanggal 09 September 2021 diruang F.2.1 telah diselenggarakan sidang skripsi dengan judul **PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*** (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset) untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar SARJANA EKONOMI bagi mahasiswa:

Nama : Della Gustulangi
NPM : 1512120168
JURUSAN : Akuntansi

Dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari:

Nama	Status	Tanda Tangan
1. Reva Meiliana., S.E., M.Acc., Akt	Ketua Penguji	_____
2. Toni Nurhadianto., S.E., M.Sc	Anggota	_____

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya

Dr. Faurani I Santi Singagerda., S.E., M.Sc
NIK. 30040419

RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Della Gustulangi
NPM : 1512120168
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 08 Agustus 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Gg. Mawar 1 No. 42
Suku : Palembang
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : dgustulangi@gmail.com
No. Hp : 085273795500

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 : TK YWKA BATURAJA
2003 – 2009 : SDN 7 OKU BATURAJA
2009 – 2012 : SMP XAVERIUS BATURAJA
2012 – 2015 : SMAN 5 OKU BATURAJA

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan diatas adalah benar.

Yang menyatakan,

Bandar Lampung, 09 September 2021

(Della Gustulangi)

1512120168

MOTO

“Tak perlu cemas, setiap masalah dalam hidupmu adalah cara tuhan menunjukkan berkah dan keajaibannya”.

- **Della Gustulangi**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terimakasihku kepada kedua orang tuaku :

**Darwis
Alm. Ernida**

Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a restu yang tulus, dukungan dan semangat, serta pengorbanan yang tiada tara.

**Saudara Serta Keluarga Besar
(Rakhe Cepy Langi dan Muhammad Bagas Septian., S.Kom)**

Yang selalu memberikan warna di hari - hariku.

**Sahabat-Sahabat Seperjuangan
(Amel, Sella, Caca, Jijot, Bella, Desi)
yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, kebahagiaan dan pembelajaran untukku.**

**Almamaterku Tercinta
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA**

**THE EFFECT OF THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT INSTITUTIONS ON THE
GOOD GOVERNANCEIMPLEMENTATION**

**(Acase Study on The Lampung Provincial Government of The Financial
Management Agency in The Asset Sector)**

ABSTRACT

By

Della Gustulangi

1512120168

The purpose of this study was to determine the effect of the performance accountability system implementation of government institutions on the good governance implementation (a case study on the Lampung provincial government of the financial management agency in the asset sector). This study used primary data collected by using a questionnaire as an instrument of data collection techniques distributed to respondents. Respondents in this study were Civil Servants in the Lampung Provincial Government Section of the Financial Management Agency for the Asset Sector. Based on the results of the research, there was a significant influence between the implementation of the Government Agency Performance Accountability System on the Implementation of Good Governance.

**Keywords: Performance Accountability System for Government Agencies, Good
Governance**

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENERAPAN *GOOD
GOVERNANCE***
**(Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola
Keuangan Bidang Aset)**

ABSTRAK

Oleh

Della Gustulangi

1512120168

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terhadap penerapan *good governance* (studi kasus pada pemerintah provinsi lampung bagian badan pengelola keuangan bidang aset). Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner sebagai instrument teknik pengumpulan data yang disebarkan pada responden. Responden pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintahan Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Berdasarkan hasil dari penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance*.

Kata kunci: **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Good Governance*,**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di IIB Darmajaya Bandar Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa isi yang tersaji di dalamnya masih banyak memerlukan perbaikan, karena keterbatasan penulis baik keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun pengalaman. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima arahan, bimbingan, dan petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Ir. Firmansyah Y. Alfian, M.B.A, M.Sc selaku Rektor Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.
2. Ibu Dr. Faurani I Santi Singagerda., S.E., M.Sc selaku dekan fakultas Bisnis dan Ekonomi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
3. Bapak Toni Nurhadianto., S.E., M.Sc selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.
4. Ibu Nolita Yeni Siregar., S.E., Ak., M.S.Ak., CA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Reva Meiliana., S.E., M.Acc., Akt selaku ketua penguji.
6. Bapak Toni Nurhadianto., S.E., M.Sc anggota penguji.
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, bapak Darwis dan ibu Alm.Ernida yang tak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, dan

motivasi sehingga skripsi ini dapat tersedlesaikan. Terima kasih sudah menjadi orang tua terhebat untukku.

8. Adik Rakhe Cepy Langi selalu memberikan semangat lagi ketika jenuh dalam menyelesaikan skripsiku ini.
9. Sahabat-sahabatku (Irfan, Nages, Agus, Dyah, Oca, Ana, Cani, Keke, Riska, Ardi). Terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
10. Sahabat terkasih ku Muhammad Bagas Septian terimakasih atas semangat serta dukungan yang diberikan.
11. Teman-teman seperjuangn skripsi (Amel, Sella, Caca, Jijot, Bella, Desi) serta rekan-rekan angkatan 2015 dan adik tingkat serta semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan selama ini.
12. Almamaterku tercinta, IIB Darmajaya yang sudah memberi banyak wawasan dan pengalaman berharga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, hal ini dilakukan karena keterbatasan penulis semata. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan penulis selanjutnya.

Bandar Lampung, 09 September 2021

Penulis,

Della Gustulangi

1512120168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penerapan <i>Good Governance</i>	11
2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	12
2.3 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13
2.4 Penelitian Terdahulu	15
2.5 Kerangka Penelitian	16
2.6 Bangunan Hipotesis	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data.....	18
3.2 Metode Pengumpulan Data	18
3.2.1 Kuisisioner	18
3.3 Populasi Dan sampel Penelitian	19
3.3.1 Populasi Penelitian	19
3.3.2 Sampel Penelitian	19
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	20
3.4.1. Variabel Penelitian	20
3.4.1.1 Variabel Dependen	20
3.4.1.2 Variabel Independen	20
3.5 Metode Analisis Data	22
3.5.1 Statistik Deskriptif	22
3.5.2 Uji Validitas	22
3.5.3 Uji Reabilitas.....	22
3.6.Uji Asumsi Klasik	23
3.6.1. Uji Normalitas	23
3.6.2. Uji Mulltikolinieritas.....	24
3.6.3. Uji Autokorelasi	24
3.6.4. Uji Heteroskedatisitas	24
3.7.Uji Regresi Linear Berganda.....	25
3.8.Uji Keofisien Determinasi.....	25
3.9.Uji Hipotesis.....	26
3.9.1. Uji F.....	26
3.9.2. Uji T.....	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data.....	28
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	28
4.1.2 Deskripsi Variabell Penelitian	31
4.2 Uji Statistik Deskriptif	36
4.3 Uji Validitas	37

4.4 Uji Reabilitas.....	39
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	40
4.5.1. Uji Normalitas	40
4.5.2. Uji Multikolinieritas.....	41
4.5.3. Uji Autokorelasi	42
4.5.4. Uji Heteroskedatisitas.....	43
4.6. Hasil Analisis Data.....	43
4.6.1. Uji Regresi Linear Berganda.....	43
4.7. Uji Keofisien Determinasi.....	44
4.8. Uji Hipotesis.....	45
4.8.1. Uji F.....	45
4.8.2. Uji T.....	47
4.9. Pembahasan.....	47
4.9.1. Pengaruh Implementasi SAKIP terhadap Penerapan <i>good governance</i>	47

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	50
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	50
5.3 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya waktu, pengukuran kinerja pada instansi pemerintah mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran kinerja yang berorientasi pada input (lebih spesifik anggaran) bergeser pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) (Asmoko, 2014).

Good governance merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas *GOOD GOVERNANCE* di instansi pemerintah. Sebelum wacana *good governance* mendominasi arah reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, terminologi seperti “*Less Government, Entrepreneurial Government*” dan sejenisnya sempat menjadi wacana yang ditulis oleh (Ted Gaebler dan David Osborne 1992), yaitu “*Reinventing Government*” yang kemudian populer dengan “*Entrepreneurial Government*” (Pemerintahan Wirausaha).

Hal tersebut telah menjadi rujukan penting bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam buku “*Reinventing Government*” berpendapat bahwa kegagalan utama pemerintahan adalah karena kelemahan manajemennya. Masalahnya bukan terletak pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana cara pemerintah mengerjakannya. Buku ini dianggap sebagai awal dari kampanye “*Good Governance*”. Kemudian pada tahun 1996, Plastrik dan Osborne menerbitkan judul “*Banishing Bureaucracy*” menyarankan agar birokrasi dipangkas supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Prinsipnya adalah “*The least government is the best government*”. Konsep dan prinsip-prinsip tersebut begitu cepat meluas ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia.

Di Indonesia, sejak tahun 1998 ada kerjasama dengan UNDP, yaitu program untuk lebih memberdayakan *governance* dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Program tersebut dikenal dengan : “*Partnership to Support Governance Reform in Indonesia*” dari UNDP, World Bank, dan Asian Development Bank (ADB). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atau “*Partnership for Governance Reform in Indonesia*” yang merupakan kerjasama antara UNDP, World Bank, ADB beserta negara-negara sahabat, masyarakat madani dan pemerintah Indonesia. Melalui program inilah “*Good Governance*” menjadi semakin populer di Indonesia.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk menyelenggarakan pemerintahan, Gubernur selaku penyelenggara eksekutif daerah di bidang otonomi daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Dikaitkan dengan masalah akuntabilitas dalam artian pertanggungjawaban, maka di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dikemukakan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 27 ayat (2) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; ayat (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan serangkaian Peraturan Pemerintah dan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban (baca akuntabilitas), terutama tercermin dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. PP Nomor 108 Tahun

2000 tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dalam penjelasan PP Nomor 108 ini, dikemukakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah, akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Selanjutnya beberapa pasal dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dan menarik untuk dikemukakan adalah sebagai berikut : Pasal (1) butir-butir : *Rencana strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disyahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan misi, visi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah. Pertanggung jawaban akhir tahunan anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahu anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra.*

Dari gambaran mekanisme dan substansi LPJ ini maka pertanggungjawaban ini pada hakikatnya merupakan akuntabilitas horizontal. Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD, mekanisme dan substansi pertanggungjawaban telah dimulai pada saat pengesahan Renstra oleh DPRD, yang selanjutnya Renstra ini merupakan tolak ukur bagi akuntabilitas Kepala Daerah. Kemudian secara lebih mendalam substansi dari LPJ dan periodisasinya, meliputi petanggungjawaban

akhir tahun anggaran; pertanggungjawaban akhir masa jabatan; dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu. Selanjutnya secara substansial dikemukakan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembantuan yang merupakan kinerja Kepala Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur Renstra.

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (pertanggungjawaban keuangan daerah) dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 dalam Bab VI, “Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”, maka secara tegas dalam Pasal 37 ayat (1) *Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sekali setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.* Kemudian dalam pasal 38, dikemukakan bahwa *Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri atas laporan perhitungan APBD; Nota perhitungan APBD; Laporan Aliran Kas; dan Neraca Daerah.*

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil inisiatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan serta konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasikan pencapaian *outcome* serta upaya dalam menghasilkan hasil yang lebih baik dari pencapaian sebelumnya.

Instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menerapkan SAKIP serta menyampaikan pelaporan yaitu instansi yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota. Penanggung jawab dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu pejabat pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melayani fungsi administrasi pada instansi masing-masing, lalu pimpinan instansi bersama anggota kerja diharuskan untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapai. (Andriani et al., 2015).

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (LAN dan BPKP, 2000) .

Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa selain laporan keuangan setiap instansi pemerintah juga wajib menyusun laporan kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Seperti fenomena yang di kutip dari kompas.com tahun 2019, tentang kasus korupsi di Provinsi Lampung yang menjerat 4 Bupati sejak tahun 2018. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/07/190100965/jerat-korupsi-di-provinsi-lampung-4-bupati-tertangkap-kpk-sejak-2018?page=all>.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan *Good Governance* secara utuh.

Di Provinsi Lampung penerapan *Good Governance* dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suara suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Sehingga penulis ingin mengetahui tingkat penerapan *Good Governance* yang ada di Provinsi Lampung khususnya pada Pemerintahan Provinsi Lampung.

Penelitian ini mereplika penelitian (jajang, 2012) yang berjudul pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) terhadap penerapan *Good Governance*. Yang membedakan penelitian ini dengan replika yaitu pada objek penelitian. Jika penelitian (jajang, 2012) meneliti 14 dinas dikabupaten Ciamis sedangkan peneliti menggunakan Dinas Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), penerapan *Good Governance* dan mengetahui seberapa besar pengaruh implemtasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Penelitian ini fokus pada faktor Pedoman

SAKIP dan penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance* (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset)”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset.
2. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian adalah variabel implementasi SAKIP terhadap penerapan *Good Governance* diluar dari itu maka penulis tidak akan membahasnya dalam penelitian ini.
3. Populasi penelitian adalah Dinas Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh pada penerapan *Good Governance* di Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset ?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di utarakan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Untuk penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, pengembangan terkait implementasi SAKIP dan good penerapan *Good Governance* pada instansi pemerintahan.

2. Untuk Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna pengetahuan atau pembelajaran mengenai profesionalisme yang mengacu pada pemahaman mengenai implementasi SAKIP dan penerapan *Good Governance*.

3. Untuk Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam pengembangan teori dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan penelitian ini, berikut akan diuraikan urutan garis besarnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi alasan diangkat dalam penelitian, perumusan masalah yang di ambil, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang di gunakan dalam analisis pada penelitian ini (landasan teori, dan penelitian terdahulu, ekrangka pemikiran dan pengembangan hipotesis)

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara operasional. Dalam bab ini dijelaskan mengenai variabel penelitian yang digunakan dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta bagaimana metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN

Pada bab ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta pengolahan data dan hasil analisis data penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulid berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua urain dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran saran yang diangtgap perlu untuk pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penerapan *Good Governance*

Good Governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokratisasi pasar dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, seta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaann *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (OECD dan World Bank dalam LAN, 2004). Prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikembangkan oleh UNDP adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Yaitu bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktir.

2. Taat Hukum / Rule of Law

Yaitu berupa kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak asasi manusia.

3. Transparansi

Yaitu yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. Responsif

Yaitu bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdernya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat.

5. Kesetaraan

Yaitu bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

6. Efektivitas dan Efisiensi

Yaitu bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.

7. Akuntabilitas

yaitu bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. Visi Strategik

yaitu bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

2.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu sistem yang dibuat pemerintah untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Penerapan SAKIP yang efektif, menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan *good governance* berjalan dengan baik. *Good Governance* ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan anggaran dan laporan program serta kegiatan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan oleh organisasi sektor publik Iskusksn (mahmudi, 2005;9). Bila dikaitkan dengan kinerja pemerintah, menurut (mahsun, 2006:25) kinerja memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

program/kegiatan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang berada dalam rencana strategis.

Sumantri dalam (Syafiie, 2008) menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok bagianbagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang akan dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah dibangun akan mengalami gangguan.

(Renyowijoyo, 2010) menjelaskan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship* yang hanya mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

2.3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2000 : 63). Pelaksanaan SAKIP itu sendiri, terdiri dari 5 unsur dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Rencanan Strategis / Renstra

INPRES No. 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi dan tujuan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dasar dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan rencana kinerjanya disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah (LAN , 2000 : 47).

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi Kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang berada dibawah wewenangnya seperti sumber daya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metoda kerja dan hal lainnya yang berkaitan (LAN, 2000:1)

5. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jajang Badruzaman (2012)	pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) terhadap penerapan <i>Good Governance</i> .	Variabel implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) berpengaruh terhadap penerapan <i>Good Governance</i> .
2	Ati Rosliyati (2014)	pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) terhadap penerapan <i>Good</i>	Variabel implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) berpengaruh terhadap

		<i>Governance.</i>	penerapan <i>Good Governance.</i>
3	Dendy Syaiful Akbar (2016)	pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) terhadap penerapan <i>Good Governance.</i> (studi pada BKPLD Kabupate Tasikmalaya)	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>Good Governance</i> pada BKLPD Kabupaten Tasikmalaya
4	Hendri Murdi (2020)	Faktor - Faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh.	Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dan peran APIP berpengaruh positif signifikan, sedangkan pedoman SAKIP dan budaya kerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Payakumbuh
5	Amellia Betha (2020)	Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	komitmen perangkat daerah berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan SAKIP. Sedangkan peran APIP dan budaya organisasi tidak mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan SAKIP.

2.5. Kerangka Penelitian.



2.6. Bangunan Hipotesis.

2.6. Pengaruh Implementasi SAKIP terhadap Penerapan *Good Governance*

Implementasi SAKIP dan penerapan *good govrnance* memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa : Pelaporan SAKIP merupakan metode reformasi yang tipikal, SAKIP sebagai instrumen pertanggung jawaban / tanggung gugat / kewajiban memberikan jawaban (LAN dan BPKP, 2000 : 10); SAKIP sebagai salah satu sarana untuk perwujudan *Good Governance*; SAKIP sebagai jawaban atas tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik; serta *Good Governance* merupakan tujuan akhir SAKIP, (LAN dan BPKP, 2000 :13). Sementara itu *Good Governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, pengelenggaraan pemerintahan yaang baik dan penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Institusi dari *governance* memiliki 3 domain yaitu :*state* (negara/ pemeritah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling menjalankan fungsinya masing-masing. Sementara itu menurut UNDP terdapat delapan prinsip *Good Governance*, yaitu partisipasi, taat hukum, transparansi, resposif, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Mengingat dewasa ini *Good Governance* merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas *Good Governance* di instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pardede (2017) tentang pengaruh Implementasi SAKIP terhadap Penerapan *Good Governance*.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset)”.

H1: Implementasi SAKIP berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2013), data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pun dalam bentuk file-file dan data ini harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. sumber data diperoleh dengan mendatangi secara langsung kepada responden, sumber data penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset melalui kuisisioner yang berisi pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Kuesioner

Menurut Sugiyono (2016), metode pengumpulan data adalah pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance*. Dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisikan dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan responden yang sebenarnya.

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan penilaian berdasarkan skala likert. Adapun bobot penilaiannya adalah sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)	: 5
Setuju (S)	: 4
Netral (N)	: 3
Tidak Setuju (TS)	: 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	: 1

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari mumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2013). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penelitian menggunakan *non- probability sampling*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non- probability sampling*, yaitu metode *sampling* yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel Sugiyono (2013).

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen, selanjutnya widiyanto (2013) juga menjelaskan bahwa variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Penerapan *Good Governance*.

Good Governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokratisasi pasar dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (OECD dan World Bank dalam LAN, 2004). Dalam kuesioner dinyatakan tentang sejauh mana prinsip - prinsip *Good Governance* yang dikembangkan oleh UNDP telah terealisasi, yang terdiri dari: (1) Partisipasi, (2) Taat Hukum / Rule of Law, (3) Transparansi, (4) Responsif, (5) Kesetaraan, (6) Efektivitas dan Efisiensi, (7) Akuntabilitas, (8) Visi Strategik.

3.4.2. Variabel Independen

Sugiyono dan Zulfikar (2016) menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, disebut juga variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi (LAN & BPKP, 2000 : 63). Pelaksanaan SAKIP itu sendiri, terdiri dari 5 unsur dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Rencana Strategis / Renstra
2. Rencana Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Indikator Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
Total		100%

Sumber: Per. Men. PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015

Berdasarkan lima komponen dasar manajemen kinerja tersebut maka akan dihasilkan nilai yang kemudian diinterpretasikan sebagai keberhasilan ataupun kegagalan sebuah SAKIP. Nilai, kategori, dan interpretasi ditunjukkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kategori, Nilai, dan Interpretasi Hasil Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	0-30	D	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar
2	>30-50	C	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
3	>50-65	CC	Cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
4	>65-75	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	>70 – 80	BB	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik,

			memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
6	>80 – 90	A	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
5	>90 -100	AA	Sangat Memuaskan

Sumber: Per. Men. PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Stastistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menyusun data, mengelompokannya, selanjutnya mengintreprestasikannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, Amirullah (2015). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.

3.5.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuisisioner yang ada mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuisisioner tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan korelasi bivariate, dengan melihat korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk, apabila menunjukkan hasil signifikan atau nilai sig menunjukkan dibawah 0.05 maka masing-masing indikator pertanyaan dapat dikatakan valid. Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner perlu dilakukan uji validitas. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2013).

3.5.3 Uji Reliabilitas

Menurut Hartono (2016), menjelaskan bahwa reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna mengakses “kebaikan” dari suatu pengukur. Reliabilitas

berhubungan dengan akurasi dari pengukurnya serta konsistensi dari pengukur (Hartono, 2016). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghazali, 2013).

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* (α) dengan menghitung rata-rata interkoneksi diantara butir-butir kuesioner. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variable. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali,2013). Hal tersebut dikarenakan masing-masing pertanyaan hendak mengukur sesuatu yang sama. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali. Hal ini dilakukan dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 (Ghozali,2013).

3.6. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari melakukan uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa nilai dari parameter atau estimator yang bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) atau mempunyai sifat linier, tidak bias, dan varian minimum. Uji asumsi klasik ini terdiri Uji normalitas, uji multikolieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedatisitas.

3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali,2013). Alat uji yang digunakan adalah dengan uji stastika non-parametik Kolmogorov Smirnov Z (1- Sample K-S) dengan membuat hipotesis: (Ghozali, 2013).

- a. Jika nilai *Asymp. Sig.* (2- tailed) kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

- b. Jika nilai *Asymp. Sig. (2- tailed)* lebih dari 0.05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.6.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance InflationFactor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF tolerance* $\leq 10 \leq 0,10$ Apabila atau nilai $VIF \geq$ maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013).

3.6.3. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residu (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari observasi satu ke observasi lainnya Ghozali (2013), salah satu cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson (DW) dalam hal ini, akan digunakan tabel *Durbin Watson* untuk menentukan besaran nilai D_w pada tabel statistik pengujian. Tabel DW dapat dicari dengan $t =$ Jumlah observasi dan $k =$ jumlah variabel independen, angka angka yang diperlukan dalam uji DW adalah d_U (angka yang diperoleh dari Tabel DW Batas atas), Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Dengan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan : $d_U < DW < 4 - d_U$ Dimana hipotesisnya tidak ada autokorelasi, baik positif ataupun negatif.

3.6.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastik, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang homokedastik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependent pada variabel independen. Hal ini akan mengakibatkan varians koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebihi sehingga hasil uji statistik tidak valid.

3.7. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan metode kualitatif . Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi linear berganda dengan dengan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian menggunakan aplikasi analisis SPSS. Estimasi model yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi adalah metode *Ordinari Least Square (OLS)* . Regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi , yaitu nilai konstanta (α) dan koefisien regresi (β_i) . Peneliti menggunakan pengujian teknik analisis regresi berganda, secara umum persamaan model regresi berganda yang digunakan dinyatakan sebagai berikut :

$$IS_i = \alpha + \beta_1 TK_i + e$$

Keterangan :

IS (Y) = Implementasi SAKIP

α = Konstanta

β_1 , = Koefisien Regresi

e = Kesalahan Pengganggu

3.8. Uji Koefisien Determinasi

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien Determinasi (R) untuk mengukur kemampuan model dalam memvariasi variabel dependen. Nilai koefisien yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel independen sangat terbatas. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali,2013).

3.9. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji analisis regresi Moderate (MRA)

3.9.1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak untuk memprediksi variabel Y. Jika nilai signifikansi yang di dapat $< 0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang menandakan bahwa variabel – variabel independen secara bersama–sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali,2013).

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap Fhitung, kemudian membandingkan nilai Ftabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila $F_{\text{terhitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
2. Apabila $F_{\text{terhitung}} < F_{\text{tabel}}$ dan tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

3.9.2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Uji stastistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesisi nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_i = 0.$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen Ghozali (2013). Hipotesisnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_A : \beta_i \neq 0$$

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$).

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0.05 maka hipotesis diterima yang berarti secara *partial* variabel berpengaruh terhadap Implementasi SAKIP.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka hipotesis ditolak yang berarti *partial* variabel tidak berpengaruh terhadap Implementasi SAKIP.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Deskripsi data yang merupakan gambaran yang akan digunakan untuk proses selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi responden yang menjadi objek dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik responden antara lain jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja.

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner yang telah disebarikan kepada para responden/ auditor yang ada di kantor Pemerintahan Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus sampai tanggal 10 Agustus 2021.

Tabel 4.1

Karakter data kuesioner

NO	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Kuesioner yang dikirim	53
2	Kuesioner yang tidak bisa kembali	(11)
3	Kuesioner yang tidak bisa digunakan	2
4	Kuesioner yang bisa diolah	40

Dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian terhadap karyawan yang ada di Pemerintahan Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset yang berjumlah 40 respnden. Untuk mengetahui data jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-laki	18	45%
2	Perempuan	22	55%
Total		40	100%

Sumber : Hasil data diolah , 2021

Dari tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah tertinggi perempuan yaitu 22orang, sedangkan jumlah laki-laki berjumlah 18 orang.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	<30 Tahun	24	60%
2	30 – 40 Tahun	16	40%
3	41 – 50 Tahun	0	0%
4	50 – 58 Tahun	0	0%
Total		40	100%

Sumber : Hasil data diolah , 2021

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan usia diketahui usia < 30 tahun menempati tingkat tertinggi artinya karyawan Pemerintahan Provinsi

Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset berusia < 30 tahun sebanyak 24orang.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Status

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Belum menikah	11	27,5%
2	Menikah	29	72,5%
Total		40	100%

Sumber : Hasil data di olah , 2021

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan status diketahui karyawan Pemerintahan Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset yang berstatus menikah menempati posisi tertinggi sebanyak 29 orang.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Masa Bekerja	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	<3 Tahun	3	7,5%
2	3 – 5 Tahun	20	50%
4	6 – 8 Tahun	15	37,5%
5	>8 Tahun	2	5%
Total		40	100%

Sumber : Hasil data di olah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan masa bekerja, karyawan yang sudah bekerja selama 3-5 Tahun paling tinggi yaitu berjumlah 20 orang.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil jawaban mengenai kuesioner yang disebar kepada 40 responden sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Jawaban Responden Variabel *Good Governance* (Y)

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	OPD tempat saya bekerja selalu dapat menyelesaikan setiap keluhan masyarakat sesuai dengan tupoksinya dengan tepat waktu	7	17,5	15	37,5	11	27,5	1	2,5	6	15,0
2	Dalam menetapkan kebijakan dan menyusun APBD, OPD tempat saya bekerja selalu dilibatkan sesuai dengan tupoksi.	6	15,0	21	52,5	9	22,5	2	5,0	2	5,0

3	Visi dan misi yang ditetapkan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dijadikan pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan sesuai dengan tupoksi organisasi.	5	12,5	11	27,5	12	30,0	7	17,5	5	12,5
4	. Kebijakan OPD tempat saya bekerja selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.	1	2,5	4	10,0	12	30,0	8	20,0	15	37,5
5	Dalam penggunaan sumber daya, OPD tempat saya bekerja selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.	4	10,0	5	12,5	13	32,5	11	27,5	7	17,5
6	OPD tempat saya bekerja selalu membuat dan menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan	4	10,0	6	15,0	12	30,0	7	17,5	11	27,5

	yang berlaku										
7	OPD tempat saya bekerja dalam menjalankan tugas operasionalnya selalu konsisten berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku	5	12,5	7	17,5	14	35,0	7	17,5	7	17,5
8	Dalam penggunaan sumber daya, OPD tempat saya bekerja selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal	8	20,0	8	20,0	9	22,5	8	20,0	7	17,5

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Dari tabel 4.6 diperoleh jawaban atas beberapa pernyataan yang diajukan 40 responden mengenai variabel *Good Governance* (Y) “Dalam menetapkan kebijakan dan menyusun APBD, OPD tempat saya bekerja selalu dilibatkan sesuai dengan tupoksi..” mendapat respon tertinggi dengan jawabansetuju dengan persentase masing-masing 52,5%.

Tabel 4.7

Hasil Jawaban Responden Variabel Implementasi SAKIP (X)

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	9	22,5	17	42,5	10	25,0	4	10,0	0	0
2	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	10	25,0	19	47,5	5	12,5	6	15,0	0	0
3	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.	9	22,5	16	40,0	11	27,5	3	7,5	1	2,5
4	Kegiatan / program yang	9	22,5	16	40,0	11	27,5	3	7,5	1	2,5

	disusun telah mengkomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.										
5	SAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.	15	37,5	13	32,5	9	22,5	2	5,0	1	2,5
6	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program	8	20,0	16	40,0	4	10,0	5	12,5	7	17,5
7	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.	10	25,0	13	32,5	10	25,0	4	10,0	3	7,5
8	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.	13	32,5	19	47,5	8	20,0	0	0	0	0

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Dari tabel 4.7 diperoleh jawaban atas beberapa pernyataan yang diajukan 40 responden mengenai variabel Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X) yaitu , pernyataan 9 mengenai “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.” Mendapat respon tertinggi dengan jawaban setuju yaitu sebanyak 15 orang atau 37.5 %. Sedangkan pernyataan 2 mengenai “Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin” Mendapat respon paling tinggi tetapi dengan jawaban tidak setuju sebanyak 6 orang atau 15,0%.

4.2. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menyusun data, mengelompokannya, selanjutnya mengintreprestasikannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, Amirullah (2015). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.

Tabel 4.8
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Implementasi SAKIP	40	4	15	22,54	3,504
<i>Good Governance</i>	40	1	15	21,10	2,234
Valid N. (listwise)	40				

Sumber : Hasil data di olah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai N menunjukkan jumlah sampel kuesioner yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 40 kuesioner yang di sebar

kepada karyawan Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Dilihat dari tabel diatas semua nilai memiliki nilai positif. Berikut perincian data deskriptif yang telah diolah :

1. Variabel dependen untuk penerapan *Good Governance* diperoleh rata-rata mean sebesar 21.10 dengan nilai tinggi 15 di dapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5 = sangat setuju dan nilai terendah sebesar 1 didapat dari pertanyaan dengan nilai 1= sangat tidak setuju dan 2= tidak setuju serta standar deviasinya 2,234. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai mean (Ghozali 2013).
2. Rata-rata *mean* untuk variabel bebas (*independen*) yaitu : Implementasi SAKIP memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 22.54 dengan nilai tertinggi 15 di dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5= sangat setuju dan nilai terendah sebesar 4 didapat dari pertanyaan-pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1= sangat tidak setuju dan 2= tidak setuju serta standar deviasi 3,504. Hal ini berarti tekanan ketaatan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

4.3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu alat ukur digunakan. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada keusioner mampu mengungkapkan suatu keadaan yang diukur oleh peneliti tersebut. Dalam melakukan uji validitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan 40 responden. Berdasarkan hasil pengolahan data 40 responden yang digunakan diperoleh hasil sebagai sebagai berikut :

Tabel 4.9

Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel *Good Governance* (Y)

Item Pernyataan	Sig	Alpha	Kondisi	Simpulan
Item 1	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 2	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 3	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 4	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 5	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 6	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 7	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Item 8	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji validitas untuk variabel *Good Governance* (Y) sebanyak 10 pernyataan diperoleh nilai Sig < Alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan variabel *Good Governance* (Y) dinyatakan valid.

Tabel 4.10

Hasil Perhitungan Uji Validitas Implementasi SAKIP (X)

Item Pernyataan	Sig	Alpha	Kondisi	Simpulan
Pernyataan 1	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Pernyataan 2	0,00	0,05	Sig < Alpha	Valid

Pernyataan 3	0,001	0,05	Sig < Alpha	Valid
Pernyataan 4	0,001	0,05	Sig < Alpha	Valid
Pernyataan 5	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Pernyataan 6	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Pernyataan 7	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid
Pernyataan 8	0,000	0,05	Sig < Alpha	Valid

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji validitas untuk variabel Implementasi SAKIP (X) sebanyak 8 pernyataan diperoleh nilai Sig < Alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan variabel Implementasi SAKIP (X) dinyatakan valid.

4.4. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 diperoleh hasil pengujian reliabilitas kuesioner digunakan dengan menggunakan *Alpha cronbach*. Hasil uji reliabilitas dikonsultasikan dengan daftar nilai r alpha indeks korelasi :

Tabel 4.11

Interprestasi Nilai r Alpha Indeks Kolerasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,800 – 1,000	Sangat Tinggi
0,600 – 0,799	Tinggi
0,400 – 0,599	Sedang
0,200 – 0,399	Rendah

0,000 – 0,199	Sangat Rendah
---------------	---------------

Sumber : Sugiyono (2016)

Berdasarkan tabel 4.11 ketentuan reliabilitas diatas, maka dapat dilihat hasil pengujian yang disebarkan kepada 30 responden dalam penelitian ini diperoleh nilai seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
<i>GOOD GOVERNANCE</i> (Y)	0,764	Tinggi
SAKIP (X)	0,781	Tinggi

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji reliabilitas dengan masing – masing nilai *Cronbach's Alpha* yaitu : untuk variabel *Good Governance* (Y) sebesar 0,764, variabel SAKIP (X) sebesar 0,781.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah jumlah sampel yang diambil sudah representatif atau belum, sehingga kesimpulan penelitian yang diambil dari sejumlah sampel bisa di pertanggung jawabkan. Untuk menguji normalitas pada penelitian ini penulis menggunakan program SPSS 20.0

Tabel 4.13

Hasil Perhitungan Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,787
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,566

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,566 > 0,05$. Dari hasil tersebut bahwa nilai signifikan dengan uji one sampel kolmogorov-smirnov untuk semua variabel lebih besar dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.5.2. Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance InflationFactor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF tolerance* $\leq 10 \leq 0,10$ Apabila atau nilai $VIF \geq$ maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

Tabel 4.14

Hasil Perhitungan Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Kondisi	Keterangan
Implementasi SAKIP (X)	1,000	1,000	VIF < 10 atau <i>tolerance</i> >	Tidak ada gejala Multikolinier

			0,1	
--	--	--	-----	--

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Dari hasil perhitungan pada tabel coefficients Implementasi SAKIP nilai VIF = $1,000 < 10$ atau nilai *tolerance* = $1,000 > 0,1$, maka tidak ada gejala multikolinier.

4.5.3. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (Ghozali, 2013). Pengujian gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, apabila $DU < DW < (4 - DU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.15

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,564 ^a	,318	,300	4,531	1,877

a. Predictors: (Constant), SAKIP

b. Dependent Variable: *Good Governance*

Sumber data : Data diolah SPSS, 2021

Berdasarkan uji diatas, untuk mendeteksi ada atau tidak autokolerasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan +2 yang artinya tidak terjadinya autokolerasi.

4.5.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya > 0.05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013).

Tabel 4.16

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,930	1,509		4,593	,000
1 Implementasi SAKIP	-,154	,061	-,379	2,522	,016

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa variabel Implementasi SAKIP memiliki nilai signifikan > 0,05 (0,016 > 0,05). Artinya variabel tersebut memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas.

4.6. Hasil Analisis Data

4.6.1. Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

$$Y = a + b_1X_1$$

Dimana :

$$Y = \text{GOOD GOVERNANCE}$$

a = Konstanta

X₁ = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b₁ = Koefisien regresi untuk variabel SAKIP

Tabel 4.17

Hasil Perhitungan Coefficients^a

Model	Coefficients ^a	
	B	Std. Error
(Constant)	20,790	2,445
Implementasi SAKIP	0,416	0,099

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Dari tabel 4.17 diatas merupakan hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20. Diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa :

$$IS_i = \alpha + \beta_1 TK_i + e_i + e_i$$

$$IS = 20,790 + 0,416TK + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Variabel Y atau dalam hal ini adalah *Good Governance* sebesar 20,790 dengan anggapan bahwa variabel lainnya konsta.
2. Setiap penambahan 2 satuan variabel Implementasi SAKIP (X1) maka *Good Governance* (Y) akan bertambah sebesar 0,416 satuan.

4.7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) menggambarkan seberapa sejauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai *adjusted R²* mendekati nilai satu maka variabel independen hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen. Jika *adjusted R²* mendekati nol maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2013).

Tabel 4.18

Hasil Perhitungan Uji Model Summary

Variabel	R	R Square (R²)
Implementasi SAKIP (X1)	0,564	0,318

Sumber : Hasil data diolah, 2021

Dari tabel 4.18 diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi di peroleh $R = 0,564$ yang menunjukkan tingkat hubungan antara *Good Governance* Implementasi SAKIP terhadap *Good Governance*. Sedangkan R Square (R^2) di peroleh sebesar 0,318 yang artinya penerapan *Good Governance* dipengaruhi oleh Implementasi SAKIP.

4.8. Hasil Uji Hipotesis

4.8.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak untuk memprediksi variabel Y. Jika nilai signifikansi yang di dapat $< 0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang menandakan bahwa variabel – variabel independen secara bersama–sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali,2013).

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap Fhitung, kemudian membandingkan nilai Ftabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila $F_{\text{terhitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
2. Apanila $F_{\text{terhitung}} < F_{\text{tabel}}$ dan tingkat signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima.

Tabel 4.19

Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	363,352	1	363,352	17,701	,000 ^b
	Residual	780,023	38	20,527		
	Total	1143,375	39			

a. Dependent Variable: *GOOD GOVERNANCE*

b. Predictors: (Constant), SAKIP

Sumber data : dioalh data SPSS, 2021

Pengujian Anova dipakai untuk menggambarkan tingkat pengaruh antara variabel Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) (X1) dan Penerapan *Good Governance* (Y) secara bersama-sama. Untuk menguji F dengan tingkat alpha 5% dan derajat kebebasan pembilang sebesar $k-1 = 2-1 = 1$ dan derajat kebebasan penyebut sebesar $n-k = 40-2 = 38$ sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 1.38 dan F_{hitung} 17,701.

Berdasarkan tabel 4.19 hasil analisis data, maka diperoleh F_{hitung} sebesar 17,701 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 1,38 dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan Sig $0,000 < Alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) (X) berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* (Y).

4.8.2. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji signifikan, yaitu pengujian hipotesis melalui uji t pada penelitian ini mengenai Implementasi SAKIP (X).

Tabel 4.20

Hasil Perhitungan Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Alpha	Kondisi	Keterangan
Implementasi SAKIP	4,207	1,685	0,000	0,05	t _{hitung} > t _{tabel} atau Sig < Alpha	Berpengaruh

Sumber : Hasil data diolah, 2020

Pengaruh Implementasi SAKIP (X1) terhadap Penerapan *Good Governance* (Y)

Berdasarkan tabel 4.20 didapat perhitungan pada variable Implementasi SAKIP (X) diperoleh nilai t hitung sebesar 4,207 sedangkan nilai t tabel dengan ($df = n - 2 = 41 - 2 = 38$) adalah 1,685 jadi t hitung ($4,207 > 1,685$) dan sig ($0,000 < 0,05$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga disimpulkan bahwa Implementasi SAKIP (X1) berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* (Y).

4.9. Pembahasan

4.9.1 Pengaruh Implementasi SAKIP terhadap Penerapan *Good Governance*

Pada hasil analisa data yang dilakukan variabel implementasi SAKIP berpengaruh signifikan pada Penerapan *Good Governance*. Besar nilai signifikan adalah $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN dan BPKP, 2000:63). Unsur-unsur yang terdapat pada SAKIP itu sendiri, terdiri dari rencana strategis, rencana kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. dan seperti dikemukakan oleh (Jajang, 2012) bahwa akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat dicapai dan dapat mencegah hilangnya sumber daya. Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian menyatakan pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X) terhadap *Good Governance* (Y) diterima.

Namun berdasarkan uji koefisien determinasi hasil yang didapat adalah sebesar 31,8%, hal tersebut menunjukkan bahwa 31,8% penerapan *Good Governance* dapat dijelaskan oleh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X). Sedangkan sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor-faktor lain diluar model, seperti Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, Kualitas Pelayanan Publik dan Komitmen Organisasi. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi yang dihasilkan relatif rendah, yaitu sebesar 31,8%, hal tersebut dikarenakan secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah, karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, berbeda dengan penelitian dengan data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang besar. (Dendy, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *Good Governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan metode reformasi yang tipikal, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument pertanggungjawaban/tanggung gugat/kewajiban memberikan jawaban (LAN dan BPKP, 2000:10); Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai jawaban atas tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik serta *Good Governance* merupakan tujuan akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (LAN dan BPKP, 2000). (Dendy, 2016).

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan yaitu, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Governance*. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *Good Governance* dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa organisasi pemerintahan menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat yang efisien dalam hubungannya dengan penerapan *Good Governance*. Apabila implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin baik, maka penerapan *Good Governance* akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dendy, 2016) yang menyatakan Implementasi SAKIP berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X) pada penerapan *Good Governance* (Y). Penelitian ini mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuisisioner yang telah diisi oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Lampung Bagian Badan Pengelola Keuangan Bidang Aset. Berdasarkan hasil pengujian maka terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X) terhadap Penerapan *Good Governance* (Y).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel satu instansi dalam Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini hanya menggunakan instrument kuisisioner sehingga belum menggambarkan secara utuh kondisi yang terjadi pada objek penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan. satu instansi dalam Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan instrument yang digunakan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dendy Syaiful. 2016. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal wawasan dan riset akuntansi*. Volume 4 No.1, 2016.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan *GOOD GOVERNANCE* Pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*,10, 51–60.
- Asmawi, Rewansyah. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka GOOD GOVERNANCE*. Jakarta: Yusaintanas Prima.
- Asmoko, Hindri, 2014 Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat Di Indonesia.
- Badruzaman, J & Chairunnisa, I. 2011. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan *GOOD GOVERNANCE*. Fakultas Ekonomi: UNSIL.
- Bayu, Nurzaman. 2010. Pengaruh Audit Internal terhadap *GOOD GOVERNANCE*. Skripsi yang Tidak Dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Betta, Amellia. 2020. Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*. Vol 8 No.1, 2020.

- Deddi, Noordiawan. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Donald Cooper and Willian Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Gima, Sugiama. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Edisi Pertama. Bandung: Gordaya Intimarta.
- Halimi, Firdausi. 2009. "Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-prinsip *GOOD GOVERNANCE*". Skripsi yang Tidak Dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung. .
- Jana, Rustia Permana. 2008. "Hubungan Penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah". Skripsi yang tidak dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.
- Murdi, Hendri. 2020. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi* 23 (1) Maret 2020.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan GOOD GOVERNANCE (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 2 dari 5. Jakarta: LAN.

- _____. 2000. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 3 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 4 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 5 dari 5. Jakarta : LAN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta: ANDI.
- Mudrajat, Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Strategi dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nisa, Noor Wahid. 2004. "Pengaruh Siklus Anggaran dan Pengawasan Intern terhadap *GOOD GOVERNANCE*". Skripsi yang Tidak Dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Nur, Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- P2KP I-LAN. 2007. *Model Pengukuran Pelaksanaan GOOD GOVERNANCE di Pemerintah daerah Kabupaen/Kota*. Jakarta: Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2 A I LAN).
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasio Non Laba*. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rosliyati, Ati. 2014. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan *GOOD*

GOVERNANCE. Jurnal wawasan dan riset akuntansi. Volume 1 No.2, 2014.

Rukaesih. 2004. "Peranan Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah". Skripsi yang Tidak Dipublikasikan, Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan, Universitas Padjajaran Bandung.

Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman. 2007. *Analisa Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa-Beta.

Suharsini Arikunto. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Bineka Cipta.

Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Uma, Sekaran. 2006. *Research Method For Business*. Buku 1 dan 2. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Wanalia, Wulan. 2008. "Pengaruh Audit Intern terhadap Good Corporate Governance". Skripsi yang Tidak Dipublikasikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Wilfrid J. Dixon and Frank J.Massey, Jr. 1997. *Pengantar Analisis Statistik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan dan Perundang-undangan

Instruksi Presiden RI Nomor 7, Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105, Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108, Tahun 2000. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38, Tahun 2007. Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28, Tahun 1999. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.